

**PEMANFAATAN PROGRAM DESA CINTA STATISTIK (DESA
CANTIK) UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DESA EKANG ANCULAI KABUPATEN BINTAN**

**Oleh
Joko Apriadi
NIM. 2205010071**

Abstrak

Pengelolaan data statistik di tingkat desa selama ini kerap menghadapi permasalahan berupa ketidaktepatan sasaran program pembangunan akibat data yang tidak akurat, serta keterbatasan anggaran desa untuk merekrut tenaga ahli pengelolaan data. Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) hadir sebagai kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah desa untuk mengatasi persoalan tersebut melalui penguatan statistik sektoral berbasis partisipasi lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan Program Desa Cantik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan Desa Ekan Aculai, Kecamatan Teluk Sebang, Kabupaten Bintan, ditinjau dari sembilan prinsip *good governance* menurut UNDP (1997), yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, aturan hukum, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan/kesetaraan, dan visi strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap 12 orang informan. Terdiri dari Kepala Desa, agen statistik, RT/RW, Dinas PMD Bintan, BPS Bintan, Kecamatan Teluk Sebang, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Program Desa Cantik telah memenuhi seluruh prinsip *good governance*. Partisipasi tercermin dari keterlibatan masyarakat, aparat, kelembagaan desa, dan instansi sektoral dalam pendataan. Transparansi diwujudkan melalui publikasi data via website dan baliho dengan mekanisme PPID. Akuntabilitas dibangun melalui SK Kepala Desa dan pengawasan berjenjang. Efisiensi dan efektivitas tercapai melalui optimalisasi aparat desa sebagai agen statistik serta digitalisasi data. Program ini didukung landasan hukum berjenjang tanpa pelanggaran, daya tanggap terhadap keluhan warga, konsensus melalui Musdes dan BPD, kesetaraan dalam penetapan penerima manfaat berbasis desil kesejahteraan, serta visi strategis melalui pemanfaatan data sebagai basis RKPDes dan Indeks Desa, yang dibuktikan dengan capaian Top 25 Desa Cantik Nasional Terbaik 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Desa Cantik berfungsi sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan desa yang berbasis bukti yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Desa Cantik, Tata Kelola Pemerintahan Desa, *Good Governance*, Data Statistik.

**UTILIZATION OF THE DESA CINTA STATISTIK (DESA CANTIK)
PROGRAM TO STRENGTHEN THE GOVERNANCE OF EKANG
ANCULAI VILLAGE, BINTAN REGENCY**

**By
Joko Apriadi
NIM. 2205010071**

Abstract

The management of statistical data at the village level has often faced problems in the form of inaccuracy of development program goals due to inaccurate data, as well as the limitations of the village budget to recruit data management experts. The Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) program exists as a collaboration between the Central Statistics Agency (BPS) and the village government to overcome this problem through strengthening sectoral statistics based on local participation. This study aims to analyze the use of the Beautiful Village Program in strengthening the governance of Ekang Anculai Village, Teluk Sebong District, Bintan Regency, reviewed from the nine principles of good governance according to UNDP (1997), namely participation, transparency, accountability, efficiency and effectiveness, rule of law, responsiveness, consensus-oriented, fairness/equality, and strategic vision. This study uses a qualitative method with in-depth interview techniques and documentation of 12 informants. Consisting of the Village Head, statistical agents, RT/RW, Bintan PMD Office, BPS Bintan, Teluk Sebong District, and local communities. The results of the study show that the use of the Beautiful Village Program has fulfilled all the principles of good governance. Participation is reflected in the involvement of the community, apparatus, village institutions, and sectoral agencies in data collection. Transparency is realized through the publication of data via websites and billboards with the PPID mechanism. Accountability is built through the Village Head's Decree and tiered supervision. Efficiency and effectiveness are achieved through the optimization of village apparatus as statistical agents and data digitization. This program is supported by a tiered legal foundation without violations, responsiveness to residents' complaints, consensus through Musdes and BPD, equality in the determination of beneficiaries based on welfare deciles, and a strategic vision through the use of data as the basis for RKPDes and Village Indexes, as evidenced by the achievement of the Top 25 Best National Beautiful Villages in 2024. This study concludes that the Beautiful Village Program functions as an instrument to strengthen participatory, transparent, and accountable evidence-based village governance.

Keywords: Beautiful Village, Village Governance, Good Governance, Statistical Data.